

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur Rivi

Penelitian mengenai Indonesia dan China dalam investasi infrastruktur di Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan tiga literature dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sama.

Pertama, penelitian dengan judul *REALISASI INVESTASI INFRASTRUKTUR TIONGKOK DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA* yang dilakukan oleh Pebriansyah Wanapi Alumnus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan jurusan Hubungan Internasional. Peneliti menjelaskan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara investor dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, yang menjadi fokus dari pendanaan proyek yang didanai Tiongkok adalah proyek infrastruktur seperti pembangunan Bandara, Kereta Cepat, Jalan Raya, Bendungan, Pelabuhan dan pengembangan suatu kawasan seperti perumahan dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur membuka peluang untuk Tiongkok mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan sosial politik serta hukum, seperti periode 2010-2014, nilai investasi yang masuk dari Tiongkok mencapai US\$ 1,5 miliar. Angka ini bila dirata-rata hanya US\$ 495 juta, bila dibandingkan dengan periode 2015, angkanya meningkat 26% menjadi US\$ 628 juta dan kebijakan pemerintah Indonesia yang di pengaruhi Tiongkok di

bidang ekonomi bertujuan untuk membuat laju pertumbuhan ekspor meningkat, jika penerimaan dari bidang ekspor meningkat maka pemerintahan Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar hutang luar negeri tersebut.

Investasi Tiongkok ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat pada triwulan pertama tahun 2016 dengan nilai total 464,6 juta dolar AS. Indonesia menjadi negara ke dua investasi Tiongkok di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut data BKPM realisasi nilai investasi china meningkat dari tahun sebelumnya pada triwulan pertama tahun 2015 yang lalu realisasi investasi china hanya sebesar USD 75,1 juta, terlihat bahwa kenaikan investasi Tiongkok secara signifikan atau naik 518,6%. Tiongkok sekarang menjadi investor terbesar kedua setelah Singapura di susul Jepang dan Hongkong.

Jadi penulis melihat persamaan dengan pembahasan yang di lakukan oleh peneliti pendahulu ini , seperti pembangunan infrastruktur yang di biaya oleh Tiongkok dapat meningkatkan mobilitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi naik. Beberapa pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan hasil investasi Tiongkok di bidang infrastruktur, adalah :

Pembangunan utama, seperti pembangunan jalan tol, kereta cepat bandung-jakarta , pelabuhan-pelabuhan, pembangunan transportasi publik yang dapat mendorong mobilitas masyarakat.

Kedua, penelitian dengan judul *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING JOKO WIDODO TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – TIONGKOK* yang dilakukan oleh Mohamad Rivaldi Lanti dari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin jurusan Hubungan Internasional peneliti menjelaskan bahwa Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan sering mengalami fluktuasi diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam aspek sosial maupun politik dari kedua negara di masa lampau. Namun, seiring berjalannya waktu, Tiongkok sudah mulai membuka diri untuk kembali berbaur dengan masyarakat internasional terutama dalam hal ekonomi. Dalam hubungan ekonomi, kedua negara ini dahulunya tidak berhubungan langsung, hal itu dibuktikan oleh sejarah hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok dahulu yang masih melewati negara perantara yaitu Singapura dan Hongkong. Pembukaan diri Tiongkok dalam segi ekonomi itu ternyata membuahkan hasil yang sangat baik.

Terbukti dalam satu dekade terakhir, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan berada di atas rata-rata dari pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya. Hal itu tidak lepas dari strategi pasar yang diterapkan oleh Tiongkok dalam aspek perdagangan internasional yang dimana, mengikuti pola yang diterapkan oleh sistem ekonomi kapitalis di daerah bagian pesisir/luar dan sistem ekonomi sosialis di daerah bagian darat/dalam. Sistem hybrid itu terbukti membuat ekonomi Tiongkok berkembang dengan pesat dikarenakan oleh sistem terbuka yang diterapkan di pesisir diterapkan dengan betul-betul terbuka. Dengan menerapkan sistem mengimpor bahan baku mentah dan mengekspor hasil industri manufaktur terbukti membuat perekonomian Tiongkok bisa semaju seperti sekarang ini. Seiring dengan kemajuan ekonomi Tiongkok ini, Tiongkok tidak lupa untuk membuka peran kerjasama dengan beberapa kawasan lainnya, hal itu bertujuan untuk

memperlebar kapasitas pasar Tiongkok di beberapa kawasan. Adapun beberapa kawasan tersebut adalah Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara. Khusus dalam konteks Asia Tenggara, ada yang dinamakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) atau area perdagangan bebas Tiongkok dan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia tentu saja mendapat imbas dari kerjasama ini yang dimana, hubungan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi semakin intens yang artinya hubungan ekonomi di antara kedua negara pun semakin berkembang.

Dengan adanya hubungan ekonomi yang semakin intens antara Indonesia dengan Tiongkok, tentu saja hal itu dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan sumber investasi baru dalam hal perkembangan pembangunan di Indonesia. Sejak Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, banyak negara terutama negara-negara di kawasan Afrika sudah merasakan suntikan modal dari Tiongkok untuk membantu mereka dalam hal pembangunan.

Dalam persamaan yang di lakukan oleh peneliti dengan peneliti pendahulu seperti yang coba dilakukan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dengan melihat bahwa dengan potensi ekonomi yang sangat besar, Tiongkok dapat menjadi negara investor yang cukup menguntungkan bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia dan perbandingannya sekarang Indonesia sudah termasuk Negara yang mengikuti program OBOR yang di bentuk oleh Cina, Indonesia termasuk ke dalam program Cina-Asia Tenggara yang di beri nama Maritim Silk Road.

Ketiga, penelitian ini dengan judul *DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-CHINA (TIONGKOK) PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN*

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2013) yang di lakukan oleh Nahdia Rachmayanti Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya peneliti menjelaskan bahwa Kuatnya pengaruh China menjadi hal yang penting bagi pengembangan strategis di Asia Timur dan sekitarnya, selain itu juga menjadi kunci pendorong perubahan dalam dinamika hubungan kekuasaan dan memberikan dampak yang signifikan dalam wilayah politik di Asia Timur. Dalam kawasan tersebut, China telah menjadi pemain yang berpengaruh pada segala aspek, termasuk bidang ekonomi, politik, keamanan dan militer. Untuk negaranegara di Asia Tenggara, dimana sebagian besar pernah mengalami hubungan yang sulit dengan China di masa lalu. Hubungan tersebut dapat teratasi seiring dengan kebangkitan dan kekuatan China baru di abad 21.

Sedangkan bagi Indonesia meskipun telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perkembangan hubungan bilateral dengan China, namun di dalam kebijakan tersebut secara berkelanjutan ditengarai juga menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi, Indonesia melihat adanya keuntungan dalam berhubungan baik dengan China serta semakin meningkatkan kenyamanan dalam membina hubungan tersebut. Di sisi lain, bagaimana pun Indonesia juga gamang akan peran China dalam jangka panjang di wilayahnya. Ambiguitas yang dirasakan Indonesia mengharuskannya semakin turut serta dalam kebijakan yang melibatkan kedua negara dengan menggunakan strategi sebagai respon terhadap kebangkitan China. Hubungan bilateral antara Indonesia dan China pertama kali telah dibangun pada tahun 1950 di bawah pimpinan presiden Soekarno. Seiring berjalannya waktu dan pergantian periode kepemimpinan presiden di Indonesia,

hubungan tersebut berjalan secara dinamis hingga mencapai puncaknya di tahun 2005. Melalui penandatanganan Strategic Partnership Agreement atau Deklarasi Kemitraan Strategis oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China, Hu Jintao pada April 2005 telah menjadi tonggak bersejarah bagi kemajuan hubungan kedua negara serta penetapan dasar pelaksanaan kerjasama bilateral yang lebih luas di berbagai bidang. Fokus kemitraan strategis ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama kedua negara di bidang sosial, politik, ekonomi termasuk perdagangan dan investasi, budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Persamaan peneliti dengan pendahulu ini sebelum Indonesia dengan Cina melakukan persetujuan program OBOR yang di lakukan di Negara Indonesia, kedua negara sudah memiliki hubungan bilateral yang baik sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menjadi presiden, dan perbandingannya pada saat kepresidenan SBY Indonesia melakukan pembangunan Infrastruktur tidak melalui Investasi dari Cina, sedangkan sekarang masa kepresidenan Joko Widodo Indonesia memanfaatkan Cina yang memberikan peluang dalam Investasi untuk pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan perbandingannya .

2. Kerangka Teoritis

Dalam konteks dimana terjadinya saling kepentingan dan ketergantungan antar Negara, maka suatu Negara perlu mengadakan interaksi dengan Negara lain, yang semakin mendorong terjadinya suatu kerjasama yang bersifat. Dalam konteks hubungan internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan suatu negara terhadap negara lainnya . Hubungan Internasional adalah ilmu yang membahas tentang interaksi yang terjadi antara

dua belah pihak atau lebih yang melewati batas Negara baik secara formal maupun non-formal. Dari berbagai interaksi yang terjadi dalam konteks hubungan internasional salah satunya adalah aktivitas ekonomi internasional. Yang di hubungkan dengan perkembangan dan fenomena global, dimana kekuatan negara lain menjadi topic utama dalam kajian Hubungan Internasional.

2.1. Teori Hubungan Internasional.

Dalam hal ini penulis pertama pertama mengambil pengertian hubungan internasional seperti yang di kemukakan Menurut K.J Holsti definisi Hubungan Internasional, yaitu :Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat oleh pemerintah atau warganegara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap Politik Luar Negeri atau Politik Internasional, dan meliputi segala segi hubungan antar berbagai Negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Transportasi, Komunikasi dan Perkembangan Nilai-nilai dan Etika Internasional. (Holisti, 1987)

2.2. Teori Ekonomi

Di dalam mengadakan hubungan antar bangsa yang satu dengan lainnya. Di dalam juga terdapat berbagai hubungan yang pada dasarnya adalah hubungan saling ketergantungan antara lain adalah hubungan ekonomi internasional seperti yang di kemukakan oleh Soediyono R, yaitu :

Ilmu ekonomi internasional yang sering pula kita sebut ekonomi internasional kiranya dapat di definisikan sebgaiian dari pada ekonomi yang khususnya mempelajari perilaku transaksi ekonomi internasional

perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerja suatu perekonomian dunia pada umumnya

Dalam suatu hubungan suatu Negara dengan Negara lain yang terjadinya hubungan timbal balik maka setiap Negara memiliki kepentingan masing-masing dimana ingin menaikkan perekonomian setiap negaranya, menurut John Maynard Keynes :

ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran suatu negara yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu.

2.3. Teori Kerja Sama Internasional

Didalam hubungan suatu Negara pasti adanya kerja sama internasional, kerja sama internasional adalah upaya yang perlu dilakukan untuk memperoleh Power, terutama menurut aliran Neo Liberalisme. Kerja sama internasional adalah hubungan timbal-balik yang terjadi antara negara-negara guna meningkatkan hubungan baik dan mendapat keuntungan. Kerja sama dapat dilakukan antara dua negara atau banyak negara melalui institusi internasional. Keuntungan dapat diperoleh melalui kerja sama ekonomi. Kerja sama dapat pula ditingkatkan melalui pembentukan institusi dan norma yang dapat dipatuhi bersama. (C. Pevehouse, 2014)

Kerja sama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tentu dilakukan secara rasional oleh negara maupun aktor non-negara. Namun, dalam hal ini, penulis akan fokus pada kerja sama dalam bidang infrastruktur yang dilakukan oleh aktor negara saja. Negara memilih bekerja sama sebab hal tersebut dapat memenuhi kepentingannya. Dibandingkan dengan konflik yang

diungkapkan oleh Realis, kerja sama tampaknya lebih rasional. Selain itu, konsep “Prisoner’s Dilemma” juga digunakan dalam Neo Liberalisme di mana kerja sama menjadi penentunya. Negara akan mendapat keuntungan jika hanya salah satu negara yang cacat, tetapi mereka akan rugi jika keduanya cacat. (C.Pevehouse J. S., 2014)

Kerja sama internasional dapat mencakup berbagai bidang, seperti kerja sama politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Kerja sama ekonomi tentunya merupakan kerja sama dengan keuntungan paling nyata. Inisiasi OBOR adalah kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara di dunia untuk membangun sebuah jalur perdagangan yang pada zaman dahulu merupakan jalur yang dilewati oleh pedagang dari Eropa ke Cina. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong Tiongkok untuk membangun kembali jalur tersebut dengan upaya untuk memajukan perekonomian dunia serta menghidupkan kembali jalur sutra dan menjadikannya jalur perekonomian terbesar di dunia. Pada sadarnya, hubungan antara kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok dan Indonesia telah berlangsung selama ribuan tahun.

Hingga saat ini, Indonesia dan Tiongkok masih aktif bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, infrastruktur, sains dan teknologi. Kerja sama ekonomi dan Infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat setiap tahun khususnya setelah proyek OBOR dijalankan.

2.4.Teori Bilateral

Didalam hubungan internasional terdapat hubungan bilateral yang Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa – bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana

terselegarnya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan bersifat bilateral regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni :

“Suatu bentuk kerjasama di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi”.

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa: “Hubungan bilateral adalah suatu keadaan yang mengembarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara).

2.5. Investasi Asing (Cina)

Penanaman modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, investasi asing membantu industrialisasi dalam membangun modal ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, tidak hanya membawa mesin dan uang tetapi juga membawa keterampilan teknik semenjak Tiongkok membuka dirinya terhadap dunia internasional.

Menurut Presiden CCPIT (*China Council for the Promotion of International Trade*) Chen Quiyan, mengemukakan bahwa :

Upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan membangun iklim investasi yang lebih baik mendapatkan respons positif dari

kalangan investor provinsi Guangdong, Cina. dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Penanaman modal asing (investasi) bagaikan dari kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kinerja industri besar maupun kecil, serta membangun infrastruktur guna memperlancar perekonomian dan menambahkan lapangan kerja baru. Pengertian investasi menurut Paul A. sumeslon dan W.D Nordhaus dalam bukunya *ekonomi makro*, bahwa :

“Investasi asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, modal berupa dana dan jasa (seperti transportasi pinjaman dan dana)”
(Northdhaus, 1992)

Naiknya peringkat Tiongkok yang berakumulasi dengan Hong Kong sebagai negara sumber investasi yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar AS dan sekarang Cina termasuk Negara ke 4 investor terbesar di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi Indonesia. Setiap negara memerlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang di wujudkan dengan pembangunan ekonomi. Walau kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan pembangunan selalu di pandang sebagai sebagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga harus didukung oleh pembangunan infrastruktur untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi.

2.6. Teori Pembangunan

Apabila suatu Negara ingin mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan Negara dengan mencapai kondisi perekonomian tertentu maka di butuhkan nya pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat kenaikan perekonomian Negara tersebut , menurut Emil Salim pembangunan yaitu :

Pembangunan berkesinambungan (sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

2.7. Infrastruktur Indonesia

Sejalan dengan hal tersebut pengertian infrastruktur Indonesia menurut pendapat [Sullivan dan M. Sheffrin](#) adalah :

“Infrastruktur di Indonesia termasuk [fisik](#) dan [sosial](#) dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa [jalan](#), [kereta api](#), [air bersih](#), [bandara](#), [kanal](#), [waduk](#), [tanggul](#), [pengelolaan limbah](#), [perlistrikan](#), [telekomunikasi](#), [pelabuhan](#) secara fungsional”.

2.8. Kepentingan Nasional

Selain kerja sama, kepentingan nasional suatu negara juga menjadi salah satu fokus utama dalam teori Neo Liberalisme. Kepentingan nasional adalah upaya suatu negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Power dapat digunakan dengan cara pemaksaan maupun kerja sama. Oleh karena itu, power dan kepentingan nasional dipandang sebagai sarana maupun tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam dunia internasional. (Risma Yeni, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Barack Obama Terhadap Program Nuklir Iran. (Hidayatillah, 2013)

Neo Liberalisme menyamakan kepentingan nasional suatu negara dengan upaya untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan kekuatan kapitalis. Berdasarkan logika pasar mengenai efisiensi, kompetisi serta keuntungan yang didapat melalui sistem kapital akan meningkatkan power suatu negara. (Johanna Bockman, 2013) Neoliberalism Negara dengan sistem perekonomian Neo Kapitalis seperti Tiongkok memanfaatkan kebijakan pro-pasar dalam negara sosialis, perusahaan swasta, hukum represif yang terus berkembang serta budaya konsumen untuk mencari keuntungan. Selain itu, pasar global adalah arena bermain bagi negara penganut aliran Neo Liberalisme.

Terdapat pola dinamis yang menghubungkan negara-negara di dunia dalam sistem Neo Kapitalisme tersebut. Negara model ini bahkan menggunakan pilihan berdasarkan kalkulasi keuntungan kapital guna menyelesaikan masalah dalam hubungan internasional-nya. (Ong, 1 jan 2007)

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan gagasan *One Belt and One Road* yang merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. Visi dari OBOR itu sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut, yang memadai diseluruh kawasan yang ditargetkan.

Presiden Xi Jinping memperkenalkan rencananya yaitu *One Belt and One Road* Melalui program tersebut, pemerintah Cina akan membangun dua jalur perdagangan darat dan laut. Perdagangan darat akan dibangun melalui wilayah Cina daratan dan menyambungkan negara-negara di Asia Selatan, Tengah, Eropa Timur, Tengah, Utara dan Barat. Sedangkan pembangunan jalur laut dimaksudkan untuk mengamankan jalur logistik laut dari ancaman-ancaman yang akan mengganggu perekonomiannya. (Zhang, 2017).

Inisiasi OBOR adalah upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan melalui pembangunan OBOR, transaksi miliaran dolar terjadi. Negara-negara di seluruh dunia, terutama 64 negara yang memiliki akses langsung terhadap wilayah yang dilalui OBOR dengan antusias merespons inisiasi tersebut. Keuntungan dan perekonomian negara-negara yang dilalui oleh jalur OBOR akan meningkat pesat. Namun, sampai saat ini, pembangunan infrastruktur dan investasi asing di Indonesia tampaknya masih tertinggal dari negara berkembang lain di Asia seperti Pakistan. Meskipun begitu, upaya Indonesia untuk menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, gencar dilakukan. Tiongkok sebagai negara besar dengan ekonomi yang terus

berkembang pesat menggunakan OBOR sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian negaranya, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di seluruh dunia.

OBOR akan membuka akses yang lebih besar terhadap kerja sama miliaran dolar dengan negara lain. Menurut US-China Business Council, terdapat lima kepentingan Tiongkok dalam OBOR, yaitu;

1. diversifikasi komoditas strategis Tiongkok, seperti energi dan makanan guna menyejahterakan rakyat sebab, meskipun Tiongkok adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, namun persentase lahan suburnya hanya tujuh persen,
2. menjaga perkembangan dan stabilitas perbatasan,
3. menjadi pemimpin global dengan menggunakan Soft Power,
4. membangun infrastruktur baru,
5. Globalisasi mata uang Yuan.

Sedangkan, Indonesia melihat pentingnya OBOR sebagai sarana peningkatan ekonomi negara melalui pembangunan infrastruktur dengan menggunakan investasi dari Tiongkok. Selain itu, OBOR juga dapat mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi poros maritime dunia. Dalam hal ini, kedua negara menggunakan OBOR sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek OBOR di Indonesia, kedua negara tampaknya dipersulit dengan kondisi infrastruktur dasar yang kurang memadai, birokrasi dan peraturan yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian hukum serta minimnya sumber daya manusia yang bersertifikat. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk

terus memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut guna menarik minat investor Tiongkok di Indonesia.

3. Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut:: “Jika realisasi Indonesia dan Cina dalam program OBOR untuk investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia maka akan mempermudah akses perdagangan indonesia”

4. Varibel dan Indikator

Operasionalisasi variabel dan indicator penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

Variabel dalam	Indikator	Verifikasi
Hipotesis	(Empirik)	(Analisis)
(teoritik)		

<p>Variabel bebas</p> <p>:</p> <p>Jika realisasi investasi Tiongkok di Indonesia untuk pembangunan Infrastruktur</p>	<p>1. Investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia</p> <p>2. Proyek infrastruktur di Indonesia</p>	<p>1.Minat yang tinggi dari Tiongkok</p> <p>2.Penguasaan teknologi Tiongkok</p> <p>3.Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok</p> <p>4.Keberhasilan reformasi BUMN Tiongkok</p> <p>1. Bandar Udara</p> <p>2. Pelabuhan niaga</p> <p>3. Jalan tol</p> <p>4. Relisasi kereta api</p>
<p>Variabel terikat</p> <p>:Maka akan mempermudah akses perdagangan di Indonesia</p>	<p>1. Mempermudah transaksi perdagangan di Indonesia</p> <p>2. Meningkatnya ekspor Indonesia</p>	<p>1. Tingginya perpindahan barang dari produsen ke konsumen</p> <p>2. Tingginya transaksi online</p> <p>3. Tingginya perpindahan uang</p> <p>1. Tingginya Permintaan barang dan jasa</p> <p>2. Lalu lintas meningkat di pelabuhan niaga</p>

5. Skema dan Alur Penelitian



